

SKRIPSI

OPTIMALISASI PEMANFAATAN BARANG MILIK NEGARA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK

MAHENGGIYANG BUSTAN BASRI



**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2017**

SKRIPSI

OPTIMALISASI PEMANFAATAN BARANG MILIK NEGARA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

**MAHENGGIYANG BUSTAN BASRI
A31115744**



kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2017**

SKRIPSI

OPTIMALISASI PEMANFAATAN BARANG MILIK NEGARA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK

disusun dan diajukan oleh

MAHENGGIYANG BUSTAN BASRI
A31115744

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

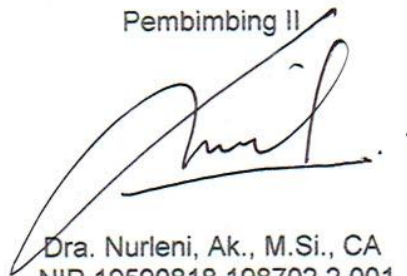
Makassar, 6 Juli 2017

Pembimbing I



Dr. Darwis Said, S.E., Ak., M.SA.
NIP 19660822 199403 1 009

Pembimbing II



Dra. Nurleni, Ak., M.Si., CA
NIP 19590818 198702 2 001

Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. Mediaty, S.E., M.Si., Ak., CA }
NIP 19650925 199002 2 001

SKRIPSI

OPTIMALISASI PEMANFAATAN BARANG MILIK NEGARA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK

disusun dan diajukan oleh

MAHENGGIYANG BUSTAN BASRI
A311 15 744

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal **27 Juli 2017** dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Panitia Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Darwis Said, S.E., Ak., M.SA.	Ketua	1 
2.	Dra. Nurleni, Ak., M.Si., CA	Sekretaris	2 
3.	Prof. Dr. Mediaty, S.E., M.Si., Ak., CA	Anggota	3 
4.	Drs. Mushar Mustafa, Ak., MM., CA	Anggota	4 

Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. Mediaty, S.E., M.Si., Ak., CA }
NIP 19650925 199002 2 001 }

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

nama : Mahenggiyang Bustan Basri

NIM : A31115744

departemen/program studi : Akuntansi

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

OPTIMALISASI PEMANFAATAN BARANG MILIK NEGARA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 6 Juli 2017

Yang membuat pernyataan,



Mahenggiyang Bustan Basri

PRAKATA

Puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah Azza wa Jalla, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian skripsi yang berjudul Optimalisasi Pemanfaatan Barang Milik Negara dalam Meningkatkan Pendapatan Negara Bukan Pajak.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Dr. Darwis Said, S.E., Ak., M.SA., dan Ibu Dra. Nurleni, Ak., M.Si., selaku dosen pembimbing atas bimbingan dan arahannya dalam penelitian skripsi ini. Tidak lupa peneliti menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan kepada peneliti.

Peneliti menyadari bahwa penelitian skripsi ini masih memiliki kekurangan baik dari segi penyusun bahasanya maupun segi lainnya, karenanya, kritik dan saran yang membangun dari pembaca akan sangat membantu untuk menyempurnakan penelitian skripsi ini.

Akhirnya kami mengharapkan semoga penelitian skripsi ini dapat bermanfaat tidak hanya bagi kami sebagai peneliti, tetapi juga bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya.

Makassar, 6 Juli 2017

Peneliti

ABSTRAK

OPTIMALISASI PEMANFAATAN BARANG MILIK NEGARA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK

OPTIMALIZATION OF STATE ASSET UTILIZATION TO IMPROVING STATE REVENUE NON-TAX

Mahenggiyang Bustan Basri
Darwis Said
Nurleni

Terbitnya Peraturan Pemerintah No.27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Negara yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78 tahun 2014 tentang tata cara pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara di Kementerian/Lembaga yang mulai dari Perencanaan kebutuhan sampai dengan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian sesungguhnya sudah memberikan petunjuk pelaksanaan yang memadai khususnya dalam pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Negara. Namun fakta dilapangan masih membuktikan bahwa Kementerian Lembaga yang disertai fungsi sebagai pengguna barang tidak sesuai dengan harapan. Permasalahan seperti manajemen Sumber Daya Manusia yang kurang berkompeten, ketidakpedulian dalam pemeliharaan aset, serta kurangnya kesadaran dan pemahaman disemua pihak tentang pentingnya melakukan pemanfaatan Barang Milik Negara yang sesuai peraturan yang berlaku. Bagaimana strategi optimalisasi Pemanfaatan Barang Milik Negara yang nantinya dapat meningkatkan Pendapatan Negara Bukan Pajak.

Kata kunci: pengelolaan, pemanfaatan, optimalisasi, barang milik negara.

The issuance of Government Regulation Number 27 Year 2014 about the Management of State Asset which is followed up by Regulation of the Minister of Finance Number 78 year 2014 on the procedure of the implementation of Utilization of State Asset whose from Planning until Coaching, Control and Control actually have been able to provide implementation guidance, especially in the implementation of utilization of State Asset but the facts still proves that the Ministry of Institutions are entrusted function as users of goods is not in line with expectations. problems such as the lack of competent Human Resource Management, the indifference in the maintenance of assets all about the importance of utilizing State Asset in accordance with the applicable regulations How to optimize the strategy of Utilization of state asset that will increase Non-Tax State Revenue.

Keywords: Management, Optimalization, Utilization, State Asset

DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	v
PRAKATA	vi
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.1.1 Penelitian Terdahulu.....	5
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Kegunaan Penelitian	8
1.4.1 Kegunaan Teoretis.....	8
1.4.2 Kegunaan Praktis.....	8
1.4.3 Kegunaan Kebijakan.....	9
1.5 Ruang Lingkup	9
1.6 Sistematika Penelitian	9
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	 11
2.1 LandasanTeori	11
2.1.1 Teori Fungsional Struktural	11
2.1.2 PengertianAset	12
2.1.3 Manajemen Aset.....	15
2.1.4 Pengertian Barang Milik Negara	17
2.1.5 Macam-Macam Barang Milik Negara.....	18
2.2 Pengelolaan Barang Milik Negara	20
2.3 Pemanfaatan Barang Milik Negara	25
2.3.1 Pengertian Pemanfaatan Barang Milik Negara	25
2.3.2 Bentuk Pemanfaatan Barang Milik Negara.....	26
2.3.3 Prinsip Umum Pemanfaatan Barang Milik Negara	37
2.5 Kerangka Pemikiran	37

BAB III METODE PENELITIAN	39
3.1 Rancangan Penelitian	39
3.2 Kehadiran Peneliti	39
3.3 Lokasi Peneliti	40
3.4 Jenis dan Sumber Data	40
3.4.1 Jenis Data	40
3.4.2 Sumber Data	41
3.5 Teknik Pengumpulan Data	41
3.5.1 Studi Kepustakaan (<i>Library Research</i>)	41
3.5.2 Penelitian Lapangan (<i>Field Research</i>)	42
3.6 Teknik Analisis Data.....	42
3.7 Pengecekan Validitas Data	43
3.8 Tahap-Tahap Penelitian	44
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	 46
4.1 Identitas Responden	46
4.1.1 Umur Responden	46
4.1.2 Jenis Kelamin Responden	47
4.1.3 Pendidikan Terakhir Responden.....	47
4.1.4 Responden Berdasarkan Jabatan Fungsional	48
4.1.2 Responden Berdasarkan Lama Bekerja	49
4.2 Deskripsi Informan Penelitian.....	49
4.3 Deskripsi Objek Penelitian.....	51
4.4 Deskripsi Hasil Penelitian	52
4.4.1 Paparan Informasi dari Wawancara.....	53
4.5 Pemahaman Mengenai BMN.....	55
4.5.1 Pemahaman Mengenai BMN <i>Idle</i>	55
4.5.2 Pemahaman Apabila BMN <i>Idle</i> Diserahkan Oleh Pengguna Barang Kepada Pengelola Barang	58
4.5.3 Pemahaman Mengenai Perbedaan antara Mekanisme Sewa, Kerja Sama Pemanfaatan dan Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna	58
4.5.4 Pemahaman bahwa Kerja Sama Pemanfaatan dan BGS/ BSG akan dapat memperkuat APBN.....	59
4.5.5 Pemahaman mengenai Optimalisasi Pendayagunaan asset <i>idle/unused, underutilize</i> , serta <i>underused</i>	60
4.5.6 Pemahaman mengenai Pemanfaatan BMN yang dilakukan Kuasa Pengguna Barang yang Berkedudukan sebagai Badan Layanan Umum (BLU).	60
4.5.7 Pemahaman mengenai Pemanfaatan BMN dalam Mendukung Penyediaan Infrastruktur	63
4.5.8 Pemahaman mengenai Pemanfaatan BMN akan Mendorong Aktivitas Ekonomi	63
4.6 Rekomendasi Hasil Penelitian	64

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	69
5.1 Kesimpulan	69
5.2 Saran	71
5.3 Keterbatasan Penelitian	72
DAFTAR PUSTAKA.....	73
LAMPIRAN	75

DAFTAR TABEL

Tabel	halaman
1.1 Rincian APBN TA 2016	4
1.2 Data Realisasi PNBK TA 2012-2016	4
4.1.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Umur.....	46
4.1.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	46
4.1.3 Pendidikan Terakhir Responden	47
4.1.4 Responden Berdasarkan Jabatan Fungsional	48
4.1.5 Responden Berdasarkan Lama Bekerja	49
4.5.8 Laporan Pemanfaatan BMN Kanwil DJKN Sulseltrabar.....	64

DAFTAR GAMBAR

Gambar	halaman
2.1 Kerangka Pemikiran Penelitian	38

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran		Halaman
1	Biodata	75
2	Pertanyaan Wawancara	76
3	Foto-foto	79

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kementerian Keuangan merupakan salah satu instansi birokrasi di Indonesia yang memegang peranan penting dalam mewujudkan *good governance*. Di samping tugas utamanya yaitu menyelenggarakan urusan di bidang keuangan, penyelenggaraan urusan di bidang kekayaan negara juga menempati posisi tidak kalah penting untuk terwujudnya akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan pemerintahan di Indonesia. Dalam rangka mengoptimalkan perannya tersebut, Kementerian Keuangan selalu melakukan perbaikan untuk menajamkan kembali tugas dan fungsinya. Salah satu kegiatan yang saat ini menjadi agenda utama Kementerian Keuangan adalah terselenggaranya manajemen aset pemerintah yang baik dan handal. Manajemen aset pemerintah oleh Kementerian Keuangan dilaksanakan oleh Eselon Satu yang bertugas dalam pengelolaan kekayaan negara yaitu Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN).

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) memiliki peran yang strategis bagi kestabilan fiskal. Peran strategis itu ditopang dari dua sisi yaitu dari penerimaan maupun belanja. Dari sisi penerimaan, pengelolaan BMN yang optimal akan menyumbang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Sementara dari sisi belanja, pengelolaan BMN berperan dalam menjaga agar belanja-belanja aset pemerintah dilakukan secara efisien dan tepat sasaran.

Peran dari sisi pengendalian belanja merupakan bagian dari fungsi dasar pengelolaan aset. Hal ini sejalan dengan pernyataan Schuman dan Brent (2005) dalam jurnal ilmiahnya, *Asset Life Cycle Management: towards improving*

physical asset performance in the process industry. Merujuk pada pernyataan Schuman dan Brent tersebut, *Asset Life Cycle Management (ALCM)* bertujuan untuk meningkatkan kinerja aset fisik dan merupakan salah satu strategi dalam rangka *cost saving* (menghemat biaya).

Sementara itu, peran sebagai penyokong penerimaan merupakan fungsi turunan dari BMN. Dalam pengelolaan aset, aset hanya diperoleh dan didayagunakan jika entitas benar-benar membutuhkannya. Ketika aset-aset yang dimiliki itu ternyata tidak lagi dibutuhkan, maka terhadap aset-aset itu harus dilakukan upaya pengelolaan lebih lanjut sehingga daya gunanya tetap optimal atau menghasilkan pendapatan. Dari perspektif Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), peran sebagai pengendali belanja dan penyokong penerimaan ini pun berjalan pada periode yang sama. Di satu sisi belanja pemerintah atas aset dijaga agar efisien dan efektif, di sisi lain aset-aset yang *idle* harus memberikan sumbangan dalam bentuk PNBP.

Pengelolaan BMN di masa depan tak hanya perlu mengedepankan aspek tertib hukum, tertib administrasi, dan tertib fisik saja, tetapi juga harus mampu menunjang APBN. Hal ini dilakukan melalui upaya agar BMN yang ada mampu memberikan pendapatan sehingga berkontribusi pada pos penerimaan dalam APBN. Peraturan tentang BMN memang telah mengakomodir beberapa alternatif pemanfaatan aset, seperti sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/ Bangun Serah Guna (BSG), atau Kerjasama Pemanfaatan (KSP). Namun demikian, alternatif itu masih belum dilakukan secara optimal karena DJKN selaku pengelola barang terkesan bersifat menunggu permohonan. Ke depan, *yield* dari pengelolaan aset-aset *idle* perlu ditingkatkan. Paling tidak, *yield* tersebut tidak terlalu tertinggal dari sektor komersil. Untuk meningkatkan *yield* dari BMN maka upaya pemanfaatan BMN melalui jalinan interaksi dengan sektor swasta perlu ditingkatkan.

Pada masa pemerintahan kabinet kerja, sebagaimana yang tercantum dalam nawacita, pemerintah membutuhkan penerimaan negara untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur di segala bidang. Oleh karena itu Negara harus mengoptimalkan penerimaan negara serta meningkatkan efisiensi serta efektifitas belanja negara. Kebijakan fiskal tahun 2015-2019 mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan dengan mempertahankan keberlanjutan fiskal melalui peningkatan penerimaan negara.

Penerimaan perpajakan yang menjadi andalan penerimaan negara tidak mampu menutupi seluruh pengeluaran Negara, sebagaimana dapat dilihat pada rincian APBN tahun 2016 sebagai berikut.

TABEL 1.1
Rincian APBN TA 2016

Uraian	2016 (Triliun Rupiah)		
	RAPBN	APBN	Selisih
A. PENDAPATAN NEGARA	1.848,1	1.822,5	(25,6)
I. PENDAPATAN DALAM NEGERI	1.846,1	1.820,5	(25,6)
1. PENERIMAAN PERPAJAKAN	1.565,8	1.546,7	(19,1)
2. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	280,3	273,8	(6,4)
II. PENERIMAAN HIBAH	2,0	2,0	0,0
B. BELANJA NEGARA	2.121,3	2.095,7	(25,6)
I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT	1.339,1	1.325,6	(13,5)
1. Belanja K/L	780,4	784,1	3,7
2. Belanja Non K/L	558,7	541,4	(17,3)
II. TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA	782,2	770,2	(12,0)
1. Transfer ke Daerah	735,2	723,2	(12,0)
2. Dana Desa	47,0	47,0	0,0
C. KESEIMBANGAN PRIMER	(89,7)	(88,2)	1,5
D. SURPLUS/ (DEFISIT) ANGGARAN	(273,2)	(273,2)	0,0
<i>% Surplus/ (Defisit) terhadap PDB</i>	<i>(2,1)</i>	<i>(2,2)</i>	<i>(0,0)</i>
E. PEMBIAYAAN ANGGARAN (I + II)	273,2	273,2	(0,0)
I. PEMBIAYAAN DALAM NEGERI	272,0	272,8	0,8
II. PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (neto)	1,2	0,4	(0,8)

Sumber : Kanwil DJKN Sulseltrabar

Oleh karena itu PNBPN yang salah-satunya berasal dari pengelolaan BMN khususnya pada tahap pemanfaatan BMN harus dioptimalkan untuk mendukung penerimaan negara. Selama ini PNBPN yang salah satunya berasal dari pengelolaan BMN khususnya pada tahap pemanfaatan BMN belum digali secara

optimal oleh Kementerian Negara/Lembaga (K/L) yang memiliki PNBP terutama yang berasal dari pengelolaan BMN. Data realisasi PNBP (dalam triliun rupiah) dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 dapat dilihat pada Tabel 1.2 sebagai berikut.

TABEL 1.2
DATA REALISASI PNBP TA 2012-2016 (Triliun Rupiah)

JENIS PNBP	2012	2013	2014	2015	2016
SDA Migas & Nonmigas	225.8	226.4	242.9	118.9	124.9
Bagian laba BUMN	30.8	34.0	40.3	37.0	34.2
PNBP lainnya	73.5	69.7	85.8	90.1	79.4
Badan Layanan Umum	21.7	24.6	29.6	23.1	35.4

Sumber: Kanwil DJKN Sulseltrabar (APBN 2016)

Berdasarkan tabel diatas PNBP telah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, tetapi belum optimal. Salah-satu potensi PNBP yang belum optimal adalah PNBP yang berasal dari pengelolaan aset Negara dalam hal ini pengelolaan BMN. Pengelolaan BMN sendiri masuk ke dalam kelompok PNBP lainnya. Secara garis besar, PNBP lainnya terdiri atas beberapa penerimaan, antara lain: (a) pendapatan dari pengelolaan BMN, serta pendapatan penjualan, (b) pendapatan jasa, (c) pendapatan kejaksaan dan peradilan, (d) pendapatan bunga, (e) pendapatan gratifikasi dan uang sitaan hasil korupsi, (f) pendapatan pendidikan, (g) pendapatan iuran dan denda, serta (h) pendapatan lain-lain.

Ketentuan pengelolaan BMN mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan sebagai peraturan pelaksanaan dari undang-undang tersebut pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah,

yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2010. Dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan pengelolaan BMN yang semakin berkembang dan kompleks maka peraturan pengelolaan BMN disempurnakan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Berdasarkan peraturan tersebut, Pemerintah mengamanatkan adanya pengelolaan BMN yang dilakukan secara efisien dan efektif dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance* untuk mendukung pembangunan nasional. Selain itu, pengelolaan kekayaan negara harus dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

1.1.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya Khusnul Arifin (2012) mengenai pengenaan implementasi kebijakan sewa barang milik negara di Kepolisian Resor Bondowoso menunjukkan bahwa pelaksanaan prinsip-prinsip utama *good governance* dalam implementasi sewa barang milik negara di Polres Bondowoso yaitu transparansi dan partisipasi belum dilaksanakan dengan baik, namun prinsip akuntabilitas sudah dilaksanakan dengan baik. Kepolisian Resor Bondowoso telah melaksanakan manajemen aset dan sistem administrasi yang baik sesuai dengan kewenangannya sebagai kuasa pengguna barang. Sumber daya manusia di Polres Bondowoso yang memiliki keterampilan untuk melaksanakan administrasi barang milik negara masih terbatas, ditambah lagi dengan tidak adanya dana untuk mengumumkan barang milik negara yang bisa disewakan beserta nilai sewanya berakibat pada kurang optimalnya pelaksanaan sewa barang milik negara.

Struktur birokrasi yang tidak efisien yaitu belum adanya pelimpahan wewenang dalam proses sewa barang milik negara dari Polda Jawa Timur

kepada Polres Bondowoso mengakibatkan pelaksanaan sewa barang milik negara tidak efektif dan efisien. Namun komunikasi yang baik pada tingkat pelaksana implementasi di pemerintahan dalam pelaksanaan sewa barang milik negara di Kepolisian Resor Bondowoso dan disposisi atau sikap dari pimpinan di dalam organisasi yaitu dari Markas Besar Polri, Polda Jawa Timur dan Kepala Polres Bondowoso yang mendukung implementasi kebijakan sewa barang milik negara di Polres Bondowoso menjadi pendorong keberhasilan implementasi kebijakan.

Penelitian Nafsi Hartoyo (2014) mengenai Optimalisasi Aset Negara/ Daerah Perjalanan untuk menciptakan manajemen aset yang modern memang masih memerlukan waktu yang panjang, akan tetapi tidak mustahil untuk dilakukan apabila semua unsur yang telah disebut di atas mau melaksanakan apa yang menjadi tanggungjawab masing-masing dengan amanah dan komitmen yang tinggi. Bagaimanapun juga barang milik negara / kekayaan negara harus dikelola oleh SDM yang profesional dan handal, karena hal tersebut menjadi kebutuhan yang vital dan strategis pada masing-masing kementerian/lembaga negara. Penataan pengelolaan barang milik negara/daerah yang sesuai dengan semangat *good governance* tersebut, saat ini menjadi momentum yang tepat karena mendapat dukungan politik dari pemerintah. Pentingnya inventarisasi dan revaluasi aset/kekayaan negara yang ada saat ini sebagai bagian dari penyempurnaan manajemen aset negara secara keseluruhan. Tuntutan penerapan *good governance* dalam manajemen aset/kekayaan negara/daerah saat ini sudah tidak dapat ditunda-tunda lagi. Tentunya hal tersebut akan membuka cakrawala kita bersama tentang urgensi dan pentingnya kegiatan inventarisasi dan revaluasi BMN/D itu, sehingga dapat diharapkan mampu meningkatkan status opini LKPP

yang semula masih *disclaimer* menjadi *unqualified opinion* atau Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

DJKN merupakan pelaksana fungsional atas kewenangan dan tanggung jawab Kementerian Keuangan selaku Pengelola Barang Milik Negara. DJKN telah mengalami transformasi kelembagaan sejak tahun 2014. Salah satu amanat baru yang diemban DJKN adalah tugas sebagai unit *revenue center*.

Berangkat dari kondisi tersebut, maka dijadikan dasar untuk melaksanakan penelitian tentang Pengelolaan Barang Milik Negara dengan judul : **“Optimalisasi Pemanfaatan Barang Milik Negara dalam Meningkatkan Pendapatan Negara Bukan Pajak”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneltian ini mencoba menjawab pertanyaan sebagai berikut.

1. Faktor-faktor apa saja dalam Pemanfaatan BMN yang dapat meningkatkan PNBP?
2. Upaya apakah yang dapat dilakukan agar pemanfaatan BMN khususnya pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat (Kanwil DJKN Sulseltrabar) dapat mengoptimalkan penerimaan APBN dari sektor PNBP?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang diajukan pada sub bab sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja dalam Pemanfaatan BMN yang dapat meningkatkan PNBP pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat (Kanwil DJKN Sulseltrabar).

2. Untuk mengetahui upaya apa saja yang dapat dilakukan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat (Kanwil DJKN Sulseltrabar) agar pemanfaatan BMN dapat dilakukan secara optimal sehingga dapat meningkatkan penerimaan APBN dari sektor PNBPN.

1.4. Kegunaan Penelitian

Kegunaan Penelitian ini dapat memberikan kegunaan secara teoretis dan praktis, serta dalam hal kebijakan, yaitu sebagai berikut.

1.4.1 Kegunaan Teoretis

Dalam kegunaan teoretis, manfaat penelitian ini adalah:

- a. Hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan demi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang pengelolaan BMN.
- b. Penelitian ini akan menjadi bahan perbandingan atau acuan dalam pengembangan.

1.4.2 Kegunaan Praktis

- a. Bagi aparatur pemerintah hasil penelitian ini menjadi masukan dan pedoman dalam melakukan pengelolaan Barang Milik Negara khususnya terkait Pemanfaatan BMN.
- b. Bagi masyarakat untuk lebih mengenal, memahami, dan mempelajari lebih dalam mengenai pengelolaan BMN khususnya terkait Pemanfaatan BMN.

1.4.3 Kegunaan Kebijakan

Sebagai bahan masukan kepada pemerintah terutama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat (Kanwil DJKN Sulseltrabar) dalam membuat suatu kebijakan dimasa yang akan datang, agar dapat mencapai tujuan dari kebijakan yang optimal, khususnya dalam meningkatkan perolehan dari pemanfaatan BMN.

1.5 Ruang Lingkup

Untuk lebih terarahnya penelitian ini dan tidak menyimpang dari permasalahan yang ada, maka peneliti hanya membatasi pada lingkup sebagai berikut:

1. Peneliti akan menjadikan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat (Kanwil DJKN Sulseltrabar) sebagai sampel untuk pengambilan data mengenai pemanfaatan BMN.
2. Peneliti akan memfokuskan penelitian pengelolaan BMN pada tahap pemanfaatan, ini sesuai dengan tema penelitian yang meneliti tentang bagaimana pemanfaatan BMN ini dapat dioptimalkan untuk meningkatkan PNPB.

1.6 Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian yang digunakan untuk lebih memahami masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

Bab I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan secara singkat mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan mengenai kerangka teoretis dan pembahasan hipotesis, yang berisi teori dan bukti-bukti empiris dari penelitian terdahulu yang dijadikan kerangka konseptual.

Bab III METODE PENELITIAN

Bab ini mencakup obyek dan lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, jenis dan sumber data, serta teknik analisis data.

Bab IV HASIL PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai analisa data terhadap data yang diperoleh melalui pembahasan dan penjelasan secara kualitatif deskriptif.

Bab V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini difokuskan pada kesimpulan hasil penelitian serta mencoba untuk memberikan saran dari studi kasus yang dilakukan oleh peneliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Landasan teori adalah kemampuan seorang peneliti dalam mengaplikasikan pola berpikirnya dalam menyusun secara sistematis teori-teori yang mendukung permasalahan penelitian. Menurut Kerlinger (2002), teori adalah himpunan konsep, definisi, dan proposisi yang mengemukakan pandangan sistematis tentang gejala dengan menjabarkan relasi di antara variabel, untuk menjelaskan dan meramalkan gejala tersebut (Sugiyono, 2010: 55). Teori berguna menjadi titik tolak atau landasan berpikir dalam memecahkan atau menyoroti masalah. Fungsi teori sendiri adalah untuk menerangkan, meramalkan, memprediksi, dan menemukan keterpautan fakta-fakta yang ada secara sistematis (Effendy, 2004: 224).

Kerangka teori merupakan landasan berpikir untuk melaksanakan penelitian dan teori yang dipergunakan untuk menjelaskan fenomena sosial yang menjadi objek penelitian. Teori adalah serangkaian asumsi, konsep, dan konstruksi, definisi dan proposisi untuk menerangkan fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep (Singarimbun, 2001:47).

2.1.1 Teori Fungsional Struktural dan *Goal Setting Theory*

Teori fungsionalisme struktural, yang diperkenalkan oleh Talcott Parsons, merupakan teori dalam paradigma fakta sosial dan paling besar pengaruhnya dalam ilmu sosial di abad sekarang, sehingga dapat disinonimkan dengan sosiologi (Ritzer, 2005:117). Kekuatan teoretis Parsons terletak pada kemam-

puannya melukiskan hubungan antara struktur sosial berskala besar dan pranata sosial (Ritzer, 2005:82).

Konsepsi Pareto yang sistematis tentang masyarakat, yang dipandanginya sebagai sebuah sistem yang berada dalam keseimbangan, yakni kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang saling tergantung, sehingga perubahan satu bagian dipandang menyebabkan perubahan lain dari sistem, dan dilebur dengan pandangan Comte, Durkheim dan Spencer yang menganalogikan masyarakat dengan organisme, memainkan peran sentral dalam pengembangan teori fungsionalisme struktural Parsons (Ritzer, 2005:54-55).

Goal-setting theory menurut Edwin Locke (1968) adalah teori yang membicarakan tentang pengaruh penetapan tujuan, tantangan, dan umpan balik terhadap kinerja. Teori ini berangkat dari maksud untuk bekerja mencapai suatu tujuan itu merupakan sumber utama dari motivasi kerja. Artinya, tujuan-tujuan tersebut memberitahu pekerja mengenai apa yang harus dilakukan dan seberapa besar upaya yang harus dikerahkan. Dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan yang spesifik dapat meningkatkan kinerja bahwa tujuan-tujuan yang sulit dicapai, bila diterima, bisa menghasilkan kinerja yang lebih tinggi ketimbang tujuan-tujuan yang tidak terlalu sulit dan bahwa umpan balik akan mengarah pada kinerja yang lebih tinggi ketimbang bila tidak ada umpan balik.

2.1.2 Pengertian Aset

Pengertian *Asset* atau Aset (dengan satu s) yang telah diIndonesiakan secara umum adalah barang (*thing*) atau sesuatu barang (*anything*) yang mempunyai (As'ad, 2001: 58):

1. Nilai ekonomi (*economic value*);
2. Nilai komersial (*commercial value*); atau

3. Nilai tukar (*exchange value*) yang dimiliki oleh instansi, organisasi, badan usaha ataupun individu (perorangan).

Asset (Aset) adalah barang, yang dalam pengertian hukum disebut benda, yang terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak, baik yang berwujud (*tangible*) maupun yang tidak berwujud (*Intangible*), yang tercakup dalam aktiva/kekayaan atau harta kekayaan dari suatu instansi, organisasi, badan usaha atau individu perorangan. Berdasarkan Undang-undang No.1 Tahun 2004 yang dimaksud dengan BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Untuk melakukan operasional pemerintahan, pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah mutlak memerlukan aset. Pengertian aset ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam peraturan tersebut, barang yang diberi nama aset lebih tepatnya disebut asset tetap. Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang yang telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, yang diberi nama asset adalah barang. Menurut Pasal 1 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 ini yang dimaksud dengan:

1. Barang milik negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
2. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 menjelaskan bahwasanya Barang Milik Negara/Daerah meliputi:

- a. Barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN/APBD;
- b. Barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, yaitu:

- a. Hibah/sumbangan;
- b. Perjanjian/kontrak;
- c. Diperoleh dari ketentuan undang-undang;
- d. Diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Aset tetap menurut definisi yang dikeluarkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditulis dalam Buletin Teknis No. 01 adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum yang terdiri atas tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan.

Aset tetap adalah barang berumur lebih dari satu tahun, untuk itu data pada pengelolaan atau pejabat yang mengurus aset/barang tersebut perlu dicatat secara lengkap termasuk informasi tentang nilai. Sumber awal data aset/barang adalah pada pejabat/panitia pengadaan dan pimpinan pelaksanaan teknis kegiatan untuk aset/barang yang berasal dari APBN/D, sedangkan sumber awal aset/ barang yang berasal dari hibah dan penyerahan dari pihak ketiga adalah tim atau pejabat yang ditunjuk untuk menerima aset/barang tersebut. Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/D) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D) merupakan aset negara yang harus dikelola dengan baik. Pengelolaan aset negara tersebut tidak hanya berupa proses administratif semata, tetapi juga harus dipikirkan bagaimana cara meningkatkan efisiensi, efektifitas dan menciptakan nilai tambah dalam mengelola aset tersebut.

Pengelolaan aset negara mencakup lingkup perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembiayaan, pengawasan, dan pengendalian.

2.1.3 Manajemen Aset

Berbicara tentang manajemen aset secara umum, kita tidak terlepas dari siklus pengelolaan barang yang dimulai dari perencanaannya sampai penghapusan barang tersebut, yang kalau diurut adalah sebagai berikut (Yusuf, 2010: 31):

1. Perencanaan (*Planning*); meliputi penentuan kebutuhan (*requirement*) dan penganggarnya (*budgetting*);
2. Pengadaan (*Procurement*): meliputi cara pelaksanaannya, standar barang dan harga atau penyusunan spesifikasi dan sebagainya;
3. Penyimpanan dan penyaluran (*Storage and distribution*);
4. Pengendalian (*Controlling*);
5. Pemeliharaan (*Maintainance*);
6. Pengamanan (*Safety*);
7. Pemanfaatan penggunaan (*Utilities*);
8. Penghapusan (*Disposal*);
9. Inventarisasi (*Inventarization*).

Sedangkan kalau kita berpedoman kepada landasan yang terbaru yaitu Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 Pasal 4 ayat 2 menyatakan bahwa pengelolaan barang daerah meliputi:

1. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran
2. Pengadaan

3. Penerimaan, penyimpanan dan penyaluran
4. Penggunaan
5. Penatausahaan
6. Pemanfaatan
7. Pengamanan dan pemeliharaan
8. Penilaian
9. Penghapusan
10. Pemindahtanganan
11. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian
12. Pembiayaan, dan
13. Tuntutan ganti rugi.

Untuk itu sebagai seorang pengurus barang pada suatu Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan manajer/pengelola terhadap barang yang dibawah kontrolnya dan tentu saja menghayati siklus pengelolaan barang tersebut di atas, sedangkan dalam pengertian yang umum di masyarakat Pegawai Negeri Sipil lebih dikenal dengan manajemen barang atau manajemen material yang lebih bertitiktujuan bagaimana mengelola barang inventaris sehingga terpenuhi persyaratan optimal bagi pelayanan tugas dan fungsi instansinya.

Manajemen aset sebetulnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Manajemen Keuangan dan secara umum terkait dengan administrasi pembangunan daerah khususnya yang berkaitan dengan nilai aset, pemanfaatan aset, pencatatan nilai aset dalam neraca tahunan daerah, maupun dalam penyusunan prioritas dalam pembangunan.

Tujuan Manajemen Aset ke depan diarahkan untuk menjamin pengembangan kapasitas yang berkelanjutan dari pemerintahan daerah, maka dituntut agar dapat mengembangkan atau mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah

guna meningkatkan/mendongkrak Pendapatan Asli Daerah, yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan guna mencapai pemenuhan persyaratan optimal bagi pelayanan tugas dan fungsi instansinya terhadap masyarakat. Sedangkan menurut Doli D Siregar (2004) kita sadari bahwa Manajemen Aset merupakan salah satu profesi atau keahlian yang belum sepenuhnya berkembang dan populer di lingkungan pemerintahan maupun di satuan kerja atau instansi. Manajemen Aset itu sendiri menurut Doli D. Siregar (2004) kedepannya/selanjutnya sebenarnya terdiri dari 5 (lima) tahapan kerja yang satu sama lainnya saling terkait yaitu:

1. Inventarisasi Aset
2. Legal Audit
3. Penilaian Aset
4. Optimalisasi Aset, dan
5. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Aset (SIMA), dalam pengawasan dan pengendalian Aset.

Jadi sebetulnya kalau dilihat lebih mendalam lagi, sebenarnya manajemen aset ini berbeda dengan manajemen material atau manajemen barang inventaris milik daerah, atau boleh dikatakan khusus terhadap barang yang merupakan aset (barang modal) yang dapat dikembangkan.

2.1.4 Pengertian Barang Milik Negara

BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

BMN/D dapat dimanfaatkan atau dipindahtangankan apabila tidak digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan negara/daerah. Dalam konteks pemanfaatan tidak terjadi adanya peralihan kepemilikan dari pemerintah kepada

pihak lain, sedangkan dalam konteks pemindahtanganan akan terjadi peralihan kepemilikan atas BMN/D dari pemerintah kepada pihak lain. Pemindahtanganan BMN/D merupakan tindak lanjut atas penghapusan BMN/D itu sendiri.

Barang Milik Negara meliputi semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Perolehan lainnya yang sah antara lain berupa transfer masuk, hibah, pembatalan penghapusan, dan rampasan. Tidak termasuk dalam pengertian BMN menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah adalah barang-barang yang dikuasai dan atau dimiliki oleh:

- a. Pemerintahan Daerah
- b. Badan Usaha Milik Negara / badan Usaha Milik Daerah.
- c. Bank Pemerintahan dan Lembaga Keuangan Milik Pemerintahan.

Barang Milik Negara merupakan bagian dari aset pemerintahan, unsur-unsur aset tetap dan persediaan. Barang milik negara memiliki sistem untuk mengatur pengelolaan dalam suatu negara yaitu sistem akuntansi barang milik negara atau disebut Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN) yaitu suatu subsistem dari Sistem Akuntansi Instansi (SAI). Sistem ini diselenggarakan dengan tujuan untuk menghasilkan informasi yang diperlukan sebagai alat pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN serta pengelolaan Barang Milik Negara yang dikuasai oleh suatu unit akuntansi barang.

2.1.5 Macam-Macam Barang Milik Negara Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Pengelolaan BMN terkait pada kegiatan penggunaan sendiri, pemanfaatan atau pendayagunaan melalui transaksi sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, Bangun Guna Serah (BGS), Bangun Serah Guna (BSG), kerjasama pe-

nyediaan infrastruktur (prasarana), pemindahtanganan, penjualan, tukar menukar, hibah, penyertaan modal, pemeliharaan, BMN tidak digunakan (*idle*), pemusnahan, dan penghapusan BMN.

Jenis BMN yang ditengarai pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah tersebut adalah (1) tanah, (2) bangunan, dan (3) BMN selain tanah dan bangunan. BMN selain tanah & bangunan mencakupi BMN.

BMD tanah/bangunan untuk pemanfaatan dan pemindahtanganan berdasarkan nilai wajar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai Ayat (3) Pasal 51 dilakukan tim yang ditetapkan Gubernur/Bupati/Walikota sesuai Ayat (2) Pasal 51 dengan/tanpa Penilai yang ditetapkan Gubernur/Bupati/Walikota sesuai Ayat (2) Pasal 51. BMD bukan tanah/bangunan bernilai wajar diatas Rp.5 Miliar oleh Pemerintah Daerah dilakukan setelah mendapat persetujuan DPRD. Pemindahtanganan BMD selain tanah/bangunan bernilai wajar tepat Rp.5 Miliar kebawah dilakukan oleh Pemerintah Daerah tanpa perlu persetujuan DPRD.

Dengan demikian nilai buku aset tercantum di neraca Pemda tak dapat digunakan untuk pengelolaan BMD, karena tak selalu merepresentasikan nilai wajar. Dibutuhkan Permendagri khusus tentang (1) tata cara penetapan status tidak diperlukan lagi Pasal 54 (1) dan (2) tatacara penetapan nilai wajar BMD yang akan dipindahtangankan, agar tak menimbulkan berbagai masalah dalam audit BPK. Disamping klasifikasi tersebut di atas, terdapat klasifikasi BMN Bersifat Khusus, yaitu BMN berspesifikasi khusus, mengandung kompleksitas khusus (bandar, bandara, bendungan, kilang minyak bumi, instalasi tenaga listrik), BMN dikerjasamakan sebagai investasi & kontrak bilateral, barang lain bersifat khusus sesuai ketetapan Gubernur/Bupati/Walikota.

2.2 Pengelolaan Barang Milik Negara

Pengelolaan Barang khususnya Milik Daerah yang baik tentunya akan memudahkan penatausahaan aset negara dan merupakan sumber daya penting bagi pemerintah sebagai salah satu penopang pendapatan negara. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk dapat mengelola aset secara memadai dan akurat.

Dalam hal pengelolaan aset, pemerintah harus menggunakan pertimbangan aspek perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan atau penggunaan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan dan tuntutan ganti rugi agar aset daerah mampu memberikan kontribusi optimal bagi pemerintah daerah yang bersangkutan. Adapun peraturan dari pengelolaan Barang Milik Negara:

1. PMK No. 123/PMK.06/2013 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Lain-Lain;
2. PMK No. 33/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara;
3. PMK No. 271/KMK.06/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Tindak Lanjut Penertiban Barang.

Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara dan Lampiran :

1. PMK No. 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara

2. PMK No. 13/PMK.04/2006 tentang Penyelesaian terhadap Barang yang Dinyatakan Tidak dikuasai, Barang yang dikuasai Negara, dan Barang yang Menjadi Milik Negara.

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah ini dilaksanakan dengan memperhatikan asas-asas sebagai berikut: Azas fungsional, Azas kepastian hukum, Azas transparansi, Azas efisiensi, Azas akuntabilitas dan Azas kepastian nilai. Barang milik negara/daerah meliputi barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN/APBD dan juga barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Pengelolaan barang milik negara/daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 meliputi :

- a. Perencanaan kebutuhan dan Penganggaran;
- b. Pengadaan;
- c. Penggunaan;
- d. Pemanfaatan;
- e. Pengamanan dan Pemeliharaan;
- f. Penilaian;
- g. Pemindahtanganan;
- h. Pemusnahan;
- i. Penghapusan;
- j. Penatausahaan;
- k. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian.

Dalam pengelolaan Barang Milik Negara dapat pula memindahtangankan yang harus memiliki syarat tertentu. Adapun bentuk-bentuk pemindahtanganan BMN/D tersebut meliputi :

- a. Penjualan;

- b. Tukar menukar;
- c. Hibah;
- d. Penyertaan modal pemerintah pusat/daerah.

Pengelolaan Barang Milik Negara yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, selanjutnya dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Asas umum Pengelolaan Barang Milik Negara yaitu:

- (a) Penggunaan Barang Milik Negara oleh Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang dibatasi hanya untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kementerian Negara/Lembaga (K/L);
- (b) Tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan sesuai tugas pokok dan fungsi Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Barang wajib diserahkan kepada Pengelola Barang;
- (c) Semua penerimaan yang berasal dari pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN merupakan PNBP yang harus disetor ke rekening kas umum Negara.

Peraturan Pemerintah tersebut menjabarkan bahwa pemanfaatan BMN berupa tanah / dan atau bangunan dilaksanakan oleh Pengelola Barang. Selain itu pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan Negara/Daerah dan kepentingan umum. Bentuk pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah berupa:

- a. Sewa;
- b. Pinjam Pakai;
- c. Kerja Sama Pemanfaatan;
- d. Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna;
- e. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur;

f. Tender Pemanfaatan BMN

Pusat Pengelolaan BMN telah dituntut untuk meningkatkan komitmen dalam pengelolaan BMN di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum, baik dalam rangka penatausahaan, pengamanan, perkuatan, maupun pengamanan terhadap seluruh BMN yang cukup besar. Namun tidak bisa dipungkiri, bahwa dalam usahanya banyak ditemui berbagai macam permasalahan seputar pengelolaan BMN. Contoh dalam Kasus Pengelolaan Barang Milik Negara yang kurang baik masih teringat di benak kita musibah bendungan Situgintung di Ciputat yang menelan korban seratus orang tewas dan seratus lainnya sampai dengan sekarang belum ditemukan. Musibah tersebut tidak hanya menelan korban jiwa namun juga kerugian material yang tidak sedikit akibat sapuan banjir bandang.

Lalu apa hubungannya manajemen aset dengan kejadian di atas? Hubungannya adalah kalau saja bendungan Situgintung yang menjadi aset daerah di kelola (terus dipelihara dan diaudit) dengan baik, kecil kemungkinan bobolnya tanggul Situgintung terjadi dan kerugian yang dideritapun dapat diminimalkan. Kalau bendungan/tanggul di Jakarta dan sekitarnya menjadi aset daerah dan dipelihara dengan baik, kejadian situgintung-situgintung lainnya tidak akan terulang. Kalau saja semua pihak, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah mau bersungguh-sungguh melaksanakan modernisasi manajemen aset, maka seharusnya aset pemerintah dan daerah bisa memberikan nilai tambah bagi semua pihak termasuk masyarakat sebagai stakeholder.

Manajemen aset di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang jelas yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang ditindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan

Barang Milik Negara/Daerah Pasal 85 menyebutkan agar dilakukan inventarisasi atas BMN/D (Barang Milik Negara/Daerah), khusus berupa tanah dan/atau bangunan yang berada di kementerian/lembaga minimal sekali dalam 5 (lima) tahun. Sedangkan untuk selain tanah dan/atau bangunan hal itu merupakan kewenangan dan menjadi domain/tanggungjawab masing-masing Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Barang. Oleh sebab itu, Pemerintah melalui Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) dalam hal ini sebagai Pengelola Barang, menginstruksikan kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara, sebagai unit organisasi yang vital dalam pengelolaan BMN, agar menjadi terdepan mewujudkan *best practices* tata kelola barang milik/kekayaan negara dengan langkah pencatatan, inventarisasi dan revaluasi aset/kekayaan Negara yang diharapkan akan mampu memperbaiki/menyempurnakan administrasi pengelolaan BMN yang ada saat ini.

Penatausahaan Kementerian Keuangan juga mengatur penghapusan BMN yang sudah tidak layak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan. Usaha menata aset secara akurat dan akuntabel memang memerlukan komitmen yang tinggi dari seluruh jajaran, Untuk itu perlu dilakukan usaha peningkatan Sumber Daya Manusia secara terus-menerus terhadap seluruh petugas terkait penatausahaan dan BMN, serta mengintensifkan pembelajaran para petugas BMN di tingkat Satker dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan BMN serta tercatat dan tertibkannya seluruh aset Kementerian Keuangan.

Upaya pemanfaatan BMN melalui jalinan interaksi dengan sektor swasta perlu ditingkatkan. Hal pertama yang dapat dilakukan adalah memastikan agar Kementerian/Lembaga aktif dan secara patuh mendayagunakan BMN yang dimilikinya secara optimal melalui kegiatan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian oleh DJKN. Kedua, intensifikasi fungsi pengelolaan terhadap aset-

aset *idle*, dimana DJKN rutin melakukan pemeriksaan dokumen dan fisik aset sehingga mempertajam perannya dalam menetapkan aset-aset *idle*. Ketiga, komersialisasi aset-aset *idle* yang memiliki manfaat ekonomi, misalnya dengan menerbitkan portofolio aset yang akan disewa/BGS/BSG/KSP kan, merumuskan target PNB (yield) dari pengelolaan BMN yang juga dapat menjadi acuan K/L dalam penetapan indikator kinerja pengelolaan BMN, serta secara aktif berupaya mendayagunakan aset, seperti membuat papan iklan atau pengumuman untuk aset-aset yang akan dimanfaatkan. Keempat, penghapusan aset-aset yang tidak lagi memiliki nilai guna melalui pemindahtanganan atau pemusnahan.

2.3 Pemanfaatan Barang Milik Negara

2.3.1 Pengertian Pemanfaatan Barang Milik Negara

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.06/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara, Pemanfaatan adalah pendayagunaan BMN yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga dan/atau optimalisasi BMN dengan tidak mengubah status kepemilikan.

Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan oleh:

- a. Pengelola Barang, untuk Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya;
- b. Pengelola Barang dengan persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota, untuk Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pengelola Barang;
- c. Pengguna Barang dengan persetujuan Pengelola Barang, untuk Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaan Pengguna Barang; atau

- d. Pengguna Barang dengan persetujuan Pengelola Barang, untuk Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna Barang, dan selain tanah dan/atau bangunan.

Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan negara/daerah dan kepentingan umum.

2.3.2 Bentuk Pemanfaatan Barang Milik Negara

Bentuk-bentuk Pemanfaatan Barang Milik Negara menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.06/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara, yaitu:

A. Sewa

Sewa adalah pemanfaatan BMN oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai;

Sewa Barang Milik Negara/Daerah sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.06/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara dilaksanakan terhadap:

- a. Barang Milik Negara yang berada pada Pengelola Barang, dengan ketentuan bahwa sewa Barang Milik Negara yang berada pada Pengelola Barang tersebut dilaksanakan oleh Pengelola Barang;
- b. Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan oleh Pengguna Barang kepada Gubernur/Bupati/Walikota dengan ketentuan bahwa sewa Barang Milik Daerah yang berada pada Pengelola Barang dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota;

- c. Barang Milik Negara yang berada pada Pengguna Barang dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Barang;
- d. Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna Barang dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Barang;
- e. Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Barang;
- f. Barang Milik Negara/Daerah dapat disewakan kepada Pihak Lain;

Jangka waktu Sewa Barang Milik Negara/Daerah paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk untuk:

- a) Kerja sama infrastruktur;
- b) Kegiatan dengan karakteristik usaha yang memerlukan waktu sewa lebih dari 5 (lima) tahun dan dapat dapat diperpanjang;
- c) Ditentukan lain dalam Undang-Undang..

Sewa Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan berdasarkan perjanjian, sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.06/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara yang sekurang-kurangnya memuat:

- a. Para pihak yang terikat dalam perjanjian;
- b. Jenis, luas atau jumlah barang, besaran Sewa, dan jangka waktu;
- c. Tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu Sewa; dan
- d. Hak dan kewajiban para pihak.

Hasil Sewa Barang Milik Negara/Daerah merupakan penerimaan negara dan seluruhnya wajib disetorkan ke rekening Kas Umum Negara/Daerah.

B. Pinjam Pakai

Pinjam Pakai adalah penyerahan penggunaan barang dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang. Pinjam Pakai Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

Jangka waktu Pinjam Pakai Barang Milik Negara/Daerah paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.

Pinjam Pakai dilaksanakan berdasarkan perjanjian sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.06/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara yang sekurang-kurangnya memuat:

- a. Para pihak yang terikat dalam perjanjian;
- b. Jenis, luas atau jumlah barang yang dipinjamkan, dan jangka waktu;
- c. Tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman; dan
- d. Hak dan kewajiban para pihak.

C. Kerja Sama Pemanfaatan

Kerja Sama Pemanfaatan, yang selanjutnya disingkat KSP, adalah pendayagunaan BMN oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan negara bukan pajak dan sumber pembiayaan lainnya.

KSP atas Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.06/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara dengan ketentuan:

- a. Tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah untuk memenuhi biaya operasional, pemeliharaan, dan/atau perbaikan yang diperlukan terhadap Barang Milik Negara/Daerah tersebut;
- b. Mitra KSP ditetapkan melalui tender, kecuali untuk Barang Milik Negara/Daerah yang bersifat khusus dapat dilakukan penunjukan langsung;
- c. Penunjukan langsung mitra KSP atas Barang Milik Negara/Daerah yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan oleh Pengguna Barang terhadap Badan Usaha Milik Negara/Daerah yang memiliki bidang dan/atau wilayah kerja tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Mitra KSP harus membayar kontribusi tetap setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil KSP ke rekening Kas Umum Negara/Daerah;
- e. Besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil KSP ditetapkan dari hasil perhitungan tim sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.06/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara yang dibentuk oleh:
 1. Pengelola Barang, untuk Barang Milik Negara pada Pengelola Barang dan Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan serta sebagian tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang;
 2. Gubernur/Bupati/Walikota, untuk Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan;
 3. Pengguna Barang dan dapat melibatkan Pengelola Barang, untuk Barang

Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang; atau Pengelola Barang Milik Daerah, untuk Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan.

- f. Besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil KSP harus mendapat persetujuan Pengelola Barang;
- g. Dalam KSP Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah dan/atau bangunan, sebagian kontribusi tetap dan pembagian keuntungannya dapat berupa bangunan beserta fasilitasnya yang dibangun dalam satu kesatuan perencanaan tetapi tidak termasuk sebagai objek KSP;
- h. Besaran nilai bangunan beserta fasilitasnya sebagai bagian dari kontribusi tetap dan kontribusi pembagian keuntungan sebagaimana dimaksud pada huruf g paling banyak 10% (sepuluh persen) dari total penerimaan kontribusi tetap dan pembagian keuntungan selama masa KSP;
- i. Bangunan yang dibangun dengan biaya sebagian kontribusi tetap dan pembagian keuntungan dari awal pengadaannya merupakan Barang Milik Negara/Daerah;
- j. Selama jangka waktu pengoperasian, mitra KSP dilarang menjaminkan atau menggadaikan Barang Milik Negara/Daerah yang menjadi objek KSP;
- k. Jangka waktu KSP paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.

Semua biaya persiapan KSP yang terjadi setelah ditetapkannya mitra KSP dan biaya pelaksanaan KSP menjadi beban mitra KSP. Ketentuan mengenai jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf k tidak berlaku dalam hal KSP atas Barang Milik Negara/Daerah untuk penyediaan infrastruktur sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.06/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara berupa:

- a. Infrastruktur transportasi meliputi pelabuhan laut, sungai dan/atau danau, bandar udara, terminal, dan/atau jaringan rel dan/atau stasiun kereta api;
- b. Infrastruktur jalan meliputi jalan jalur khusus, jalan tol, dan/atau jembatan tol;
- c. Infrastruktur sumber daya air meliputi saluran pembawa air baku dan/atau waduk/bendungan;
- d. Infrastruktur air minum meliputi bangunan pengambilan air baku, jaringan transmisi, jaringan distribusi, dan/atau instalasi pengolahan air minum;
- e. Infrastruktur air limbah meliputi instalasi pengolah air limbah, jaringan pengumpul dan/atau jaringan utama, dan/atau sarana persampahan yang meliputi pengangkut dan/atau tempat pembuangan;
- f. Infrastruktur telekomunikasi meliputi jaringan telekomunikasi;
- g. Infrastruktur ketenagalistrikan meliputi pembangkit, transmisi, distribusi dan/atau instalasi tenaga listrik; dan/atau
- h. Infrastruktur minyak dan/atau gas bumi meliputi instalasi pengolahan, penyimpanan, pengangkutan, transmisi, dan/atau distribusi minyak dan/atau gas bumi.

D. Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna

Bangun Guna Serah yang selanjutnya disingkat BGS, adalah Pemanfaatan BMN berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.

Bangun Serah Guna, yang selanjutnya disingkat BSG, adalah Pemanfaatan BMN berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan

dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.

BGS atau BSG Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan dengan pertimbangan:

- a. Pengguna Barang memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan negara/daerah untuk kepentingan pelayanan umum dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi dilaksanakan oleh Pengelola Barang; dan
- b. Tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah untuk penyediaan bangunan dan fasilitas tersebut dilaksanakan oleh Pengelola Barang Milik Daerah setelah mendapat persetujuan Gubernur /Bupati/Walikota..

Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah yang status penggunaannya ada pada Pengguna Barang dan telah direncanakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang yang bersangkutan, dapat dilakukan Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna setelah terlebih dahulu diserahkan kepada:

- a. Pengelola Barang, untuk Barang Milik Negara; atau
- b. Gubernur/Bupati/Walikota, untuk Barang Milik Daerah.

BGS atau BSG sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh Pengelola Barang dengan mengikutsertakan Pengguna Barang sesuai tugas dan fungsinya.

Jangka waktu BGS atau BSG paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani. Penetapan mitra BGS atau mitra BSG dilaksanakan melalui tender.

Mitra BGS atau mitra BSG yang telah ditetapkan, selama jangka waktu pengoperasian sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.06/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara adalah:

1. Wajib membayar kontribusi ke rekening Kas Umum Negara/Daerah setiap tahun, yang besarnya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang;
2. Wajib memelihara objek Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna; dan
3. Dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau memindahtangankan:

BGS atau BSG dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang sekurang-kurangnya sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.06/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara memuat:

- a. Para pihak yang terikat dalam perjanjian;
- b. Objek Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna;
- c. Jangka waktu Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna; dan
- d. Hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian.

Izin mendirikan bangunan dalam rangka BGS atau BSG sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.06/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara harus diatas namakan:

- a. Pemerintah Republik Indonesia, untuk Barang Milik Negara; atau
- b. Pemerintah Daerah, untuk Barang Milik Daerah.

Semua biaya persiapan BGS atau BSG yang terjadi setelah ditetapkan-nya mitra Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna dan biaya pelaksanaan BGS atau BSG menjadi beban mitra yang bersangkutan.

Mitra BGS Barang Milik Negara harus menyerahkan objek BGS kepada Pengelola Barang pada akhir jangka waktu pengoperasian, setelah dilakukan audit oleh aparat pengawasan intern Pemerintah.

BSG Barang Milik Negara sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.06/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara dilaksanakan dengan tata cara:

- a. Mitra BSG harus menyerahkan objek Bangun Serah Guna kepada Pengelola Barang setelah selesainya pembangunan;
- b. Hasil BSG yang diserahkan kepada Pengelola Barang ditetapkan sebagai Barang Milik Negara;
- c. Mitra BSG dapat mendayagunakan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada huruf b sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian; dan
- d. Setelah jangka waktu pendayagunaan berakhir, objek BSG terlebih dahulu diaudit oleh aparat pengawasan intern Pemerintah sebelum penggunaannya ditetapkan oleh Pengelola Barang.

E. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur

Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur adalah kerja sama antara pemerintah dan badan usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur atas Barang Milik Negara/Daerah sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.06/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara dilaksanakan terhadap:

- a. Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah dan/atau bangunan pada Pengelola Barang/Pengguna Barang;

- b. Barang Milik Negara/Daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna Barang; atau
- c. Barang Milik Negara/Daerah selain tanah dan/atau bangunan.

Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur atas Barang Milik Negara/Daerah dilakukan antara Pemerintah dan Badan Usaha. Badan usaha sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.06/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara yang berbentuk:

- a. Perseroan terbatas;
- b. Badan Usaha Milik Negara;
- c. Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
- d. koperasi.

Jangka waktu Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur paling lama 50 (lima puluh) tahun dan dapat diperpanjang. Penetapan mitra Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mitra Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur yang telah ditetapkan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.06/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara, selama jangka waktu Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur:

- a. Dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau memindahtangankan Barang Milik Negara/Daerah yang menjadi objek Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur;
- b. Wajib memelihara objek Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur dan barang hasil Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur; dan
- c. Dapat dibebankan pembagian kelebihan keuntungan sepanjang terdapat kelebihan keuntungan yang diperoleh dari yang ditentukan pada saat perjanjian dimulai (*clawback*).

Mitra Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur harus menyerahkan objek Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur dan barang hasil Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur kepada Pemerintah pada saat berakhirnya jangka waktu Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur sesuai perjanjian. Barang hasil Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur menjadi Barang Milik Negara/Daerah sejak diserahkan kepada Pemerintah sesuai perjanjian.

F. Tender

Tender Pemanfaatan BMN, yang selanjutnya disebut Tender, adalah pemilihan mitra guna pengalokasian hak pemanfaatan BMN melalui penawaran secara tertulis untuk memperoleh penawaran tertinggi.

Tender sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.06/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara dilakukan dengan tata cara:

- a. Rencana tender diumumkan di media massa nasional;
- b. Tender dapat dilanjutkan pelaksanaannya sepanjang terdapat paling sedikit 3 (tiga) peserta calon mitra yang memasukkan penawaran;
- c. Dalam hal calon mitra yang memasukkan penawaran kurang dari 3 (tiga) peserta, dilakukan pengumuman ulang di media massa nasional; dan
- d. Dalam hal setelah pengumuman ulang:
 1. Terdapat paling sedikit 3 (tiga) peserta calon mitra, proses dilanjutkan dengan mekanisme tender;
 2. Terdapat 2 (dua) peserta calon mitra, tender dinyatakan gagal dan proses selanjutnya dilakukan dengan mekanisme seleksi langsung; atau
 3. Terdapat 1 (satu) peserta calon mitra, tender dinyatakan gagal dan proses selanjutnya dilakukan dengan mekanisme penunjukan langsung.

2.3.3 Prinsip Umum Pemanfaatan Barang Milik Negara

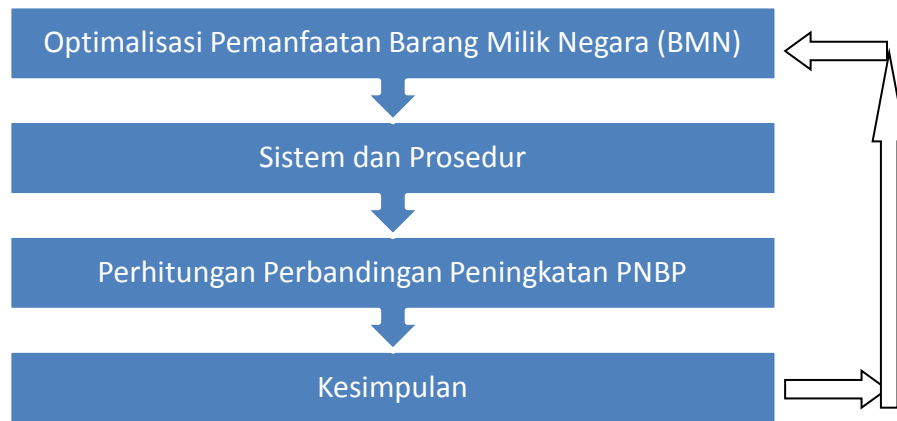
Prinsip umum Pemanfaatan Barang Milik Negara menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.06/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara, yaitu:

1. Pemanfaatan BMN dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan negara.
2. Pemanfaatan BMN dilakukan dengan memperhatikan kepentingan negara dan kepentingan umum.
3. Pemanfaatan BMN dilakukan dengan tidak mengubah status kepemilikan BMN.
4. BMN yang menjadi objek Pemanfaatan harus ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang/Pengguna Barang.
5. Biaya pemeliharaan dan pengamanan BMN serta biaya pelaksanaan yang berkaitan dengan Pemanfaatan BMN dibebankan pada mitra Pemanfaatan.
6. Penerimaan negara dari Pemanfaatan BMN merupakan penerimaan negara yang wajib disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Negara.
7. BMN yang menjadi objek Pemanfaatan dilarang dijaminkan atau digadaikan.

2.4 Kerangka Pemikiran

Kerangka berfikir merupakan penjelasan sementara gejala-gejala yang menjadi objek permasalahan tentang hubungan antar variabel bebas dan variabel terikat yang disusun dari berbagai teori yang telah diuraikan.

Hubungan antara Optimalisasi Pemanfaatan BMN dan Peningkatan PNBP dapat digambarkan dalam kerangka konseptual pada gambar 2.1 berikut.



Gambar 2.1. Kerangka pemikiran peneliti

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Rancangan penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode analisis data kualitatif yang sifatnya deskriptif, yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan data yang diperoleh dari hasil wawancara, kepustakaan, dokumentasi, dan pengamatan, kemudian dianalisis lalu ditarik kesimpulan. Dengan menggunakan teknik ini peneliti akan memberi gambaran mengenai permasalahan yang dibahas dengan mengemukakan fakta-fakta dan data-data yang diperlukan dalam pelaksanaan penelitian di lapangan. Jenis penelitian ini adalah studi kausal (*causal study*). “studi dimana peneliti ingin menemukan penyebab dari satu atau lebih masalah disebut studi kausal” (Sekaran, 2006:165).

Proses pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan secara alami tanpa memanipulasi variabel bebas atau penelitian ini bukan termasuk penelitian eksperimen. Pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan studi satu tahap (*cross-sectional study*). Pengumpulan data dilakukan hanya sekali, mungkin selama periode harian, mingguan, atau bulanan, dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian (Sekaran, 2006:177).

3.2 Kehadiran Peneliti

Penelitian Peneliti ini merupakan studi yang dilakukan dalam lingkungan alami organisasi dengan intervensi minimum oleh peneliti dan arus kerja yang normal (Sekaran, 2010:166). Sehingga di dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti bertindak sebagai *non participant observer*. Peneliti bertindak sebagai

pengamat penuh. Pengamatan tersebut berbentuk penilaian terhadap hasil wawancara dan dokumentasi terhadap objek penelitian. Kehadiran peneliti sebagai pengamat penuh ini sebelumnya telah di ketahui oleh objek penelitian melalui surat izin penelitian.

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di Kota Makassar, tepatnya pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat (Kanwil DJKN Sulseltrabar) di Gedung Keuangan Negara 2 Lantai 4 Jl. Urip Sumoharjo Km.4 Makassar. Adapun alasan pemilihan lokasi penelitian di Kanwil DJKN Sulseltrabar karena Kanwil DJKN Sulseltrabar ini melayani pengelolaan BMN untuk wilayah Kota Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat.

3.4 Jenis dan Sumber Data

3.4.1 Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua jenis data, yaitu sebagai berikut.

1. Data kualitatif adalah hasil pengamatan yang berbentuk kategori dan bukan bilangan (Sekaran, 2010). Dalam penelitian ini data kualitatifnya berupa hasil pengamatan dan hasil wawancara terhadap objek penelitian.
2. Data kuantitatifnya adalah hasil pengamatan yang di ukur dalam skala numerik /bilangan (Sekaran, 2010). Dalam penelitian ini data kuantitatifnya berupa penerimaan yang diterima dari hasil pemanfaatan BMN untuk wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat (Kanwil DJKN Sulseltrabar).

3.4.2 Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti juga menggunakan dua sumber data, yaitu sebagai berikut.

- a. Data primer merupakan data yang di peroleh langsung dari hasil pengamatan dan wawancara oleh peneliti terhadap objek penelitian.
- b. Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dengan cara memperoleh dari sumber-sumber kepustakaan, catatan dan arsip kantor. Data ini dapat berupa rekapitulasi penerimaan yang diterima dari hasil pemanfaatan BMN.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Guna mendeskripsikan masalah yang di sajikan dalam penelitian ini, maka di perlukan data serta berbagai informasi. Teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut.

3.5.1 Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi Kepustakaan (*Library Research*) yaitu pengumpulan data dengan membaca literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang di ambil, baik berupa buku, Undang Undang mengenai Pengelolaan BMN, peraturan pemerintah, peraturan daerah, tulisan ilmiah *World Wide Web (www)* dan sebagainya. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan di maksudkan untuk mengungkapkan buah pikiran yang akan membuat penelitian lebih kritis dan analitis dalam mengerjakan penelitian (Nazir, 1988). Selain itu studi kepustakaan di gunakan untuk menentukan arah dan tujuan penelitian, serta mencari konsep yang sesuai dengan permasalahan skripsi ini.

3.5.2 Penelitian lapangan (*Field Research*)

Untuk memperoleh data, maka peneliti mengadakan penelitian ke kantor Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat (Kanwil DJKN Sulseltrabar) dengan melakukan hal-hal sebagai berikut.

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara riset merupakan percakapan dua orang, yang di mulai oleh pewawancara dengan tujuan khusus memperoleh keterangan yang sesuai dengan penelitian, dan di pusatkan olehnya pada isi yang dititik beratkan pada tujuan-tujuan deskripsi, prediksi, dan penjelasan sistematis mengenai penelitian tersebut (Chadwik, 1991). Teknik wawancara kepada pihak-pihak seperti Kepala Kantor dan Para Pegawai Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat (Kanwil DJKN Sulseltrabar).

b. Dokumentasi (*Dokumentation*)

Dokumentasi merupakan suatu pengumpulan data dengan menggunakan dokumentasi dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat (Kanwil DJKN Sulseltrabar).

3.6 Teknik Analisis Data

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan analisis kualitatif. Menurut (Sugiono, 2003:11) penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain. Jadi penelitian ini memusatkan perhatian pada masalah-masalah atau fenomena-fenomena yang ada pada saat penelitian dilakukan atau masalah yang bersifat aktual, kemudian menggambar-

kan fakta-fakta tentang masalah yang diselidiki diiringi dengan interpretasi rasional yang akurat kemudian diambil kesimpulan dan saran.

3.7 Pengecekan Validitas Data

Peneliti melakukan pengecekan validitas data dengan uji reliabilitas. Pengujian tersebut dilakukan untuk mengetahui kompetensi data yang meliputi konsistensi dan akurasi data yang dikumpulkan.

Uji reliabilitas dapat dilakukan dengan triangulasi, analisis kasus negatif, dan *member check* (Sugiono, 2013:273-275).

1. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian reliabilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

b. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

c. Triangulasi Waktu

Triangulasi juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara dipagi hari saat narasumber masih segar belum banyak masalah akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel.

2. Analisis Kasus Negatif

Peneliti mencari data yang berbeda dengan data yang ditemukan. Apabila tidak ada data yang berbeda maka data yang ditemukan sudah dapat dipercaya.

3. *Member Check*

Member Check adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan *member check* adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Agar informasi yang diperoleh dan akan digunakan dalam penelitian laporan sesuai dengan apa yang dimaksud sumber data atau informan.

3.8 Tahap-Tahap Penelitian

1. Penelitian Pendahuluan

Tahap ini dilakukan dengan penelitian kepustakaan berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Peneliti mengumpulkan, membaca, menelaah berbagai buku, jurnal, literature, dan artikel, serta sumber lain yang relevan dengan pembahasan untuk mendalami teori dan konsep yang ada dan mampu mendukung pembahasan masalah dalam penelitian usulan penelitian skripsi ini.

2. Pengembangan Desain Penelitian

Peneliti menggunakan cara penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Metodologi penelitian yang digunakan adalah studi kasus dimana karakteristik masalah yang terjadi pada kehidupan nyata, berkaitan dengan latar belakang dan kondisi dari objek yang diteliti, serta interaksinya dengan lingkungan.

3. Penelitian Sebenarnya

Penelitian sebenarnya dengan peneliti langsung ke objek penelitian yaitu Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat (Kanwil DJKN Sulseltrabar) Kementerian Keuangan yang berlokasi

di Makassar. Peneliti mencoba memperoleh data berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dengan metode dokumentasi dan wawancara. Data yang diperoleh akan dianalisis dengan metode *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing and verification* untuk memperoleh kesimpulan hasil penelitian.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini, sebagaimana telah disusun dalam pertanyaan identifikasi masalah serta perumusan penelitian adalah :

- a. Faktor-faktor dalam Pemanfaatan BMN yang dapat meningkatkan PNBPN dan beberapa hal yang dapat menjadi penghambat sehingga tidak optimalnya pemanfaatan BMN khususnya BMN *Idle* dalam mendukung peningkatan PNBPN pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat (Kanwil DJKN Sulseltrabar) diantaranya adalah sebagai berikut
 1. Kesadaran serta pemahaman Pengelola Barang, Pengguna Barang, serta Kuasa Pengguna Barang dan juga terhadap *stakeholder* akan pentingnya dilakukan pemanfaatan BMN serta pelaporan terhadap BMN yang *idle*, yang mana jika dilakukan secara benar dan profesional maka akan dapat menghasilkan penerimaan negara yang cukup besar dari sektor PNBPN;
 2. Regulasi dan kebijakan khususnya mengenai pemanfaatan belum dirumuskan secara jelas, sehingga dapat dimengerti dan dipahami oleh Pengelola Barang, Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang, khususnya mengenai *punishment* yang akan diterima jika tidak melakukan pemanfaatan BMN yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 3. Masih Kurangnya ketersediaan dukungan tidak hanya dari sarana dan prasarana tapi juga dari sumber daya manusia yang berkualitas untuk

melakukan tugas pengelolaan BMN, khususnya dalam hal pemanfaatan BMN, ditingkat Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

b. Upaya serta langkah-langkah yang dapat dilakukan agar pengelolaan BMN khususnya pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat (Kanwil DJKN Sulseltrabar) dapat dilakukan secara optimal adalah sebagai berikut.

1. Memberikan pemahaman (sosialisasi) ke pengelola Barang, Pengguna Barang, dan Kuasa Pengguna Barang akan pentingnya dilakukan pemanfaatan BMN serta pelaporan terhadap BMN yang *idle*, yang mana jika dilakukan secara benar dan profesional maka akan dapat menghasilkan penerimaan negara yang cukup besar dari sektor PNBPN;
2. Melakukan perubahan serta penyederhanaan regulasi dan kebijakan terhadap regulasi dan kebijakan yang menghambat proses pemanfaatan BMN agar dapat dilakukan secara optimal;
3. Melakukan peningkatan pengawasan dan pengendalian BMN agar dapat melakukan penerbitan BMN yang lebih baik dalam mendukung pemanfaatan BMN secara optimal;
4. Memberikan *reward* bagi pengelola barang, pengguna barang, serta kuasa pengguna barang yang melakukan pemanfaatan BMN secara benar dan memberikan *punishment* terhadap pengelola barang, pengguna barang, serta kuasa pengguna barang yang tidak melakukan pemanfaatan BMN dengan benar.

5.2 Saran

1. Ketentuan pelaksanaan pemanfaatan harus disosialisasikan secara rutin kepada pengelola barang, pengguna barang, kuasa pengguna barang dan juga kepada *stakeholder*;
2. DJKN memberikan penegasan berupa petunjuk pelaksanaan yang lebih terperinci, mengenai permasalahan di lapangan terkait dengan usulan pemanfaatan BMN;
3. DJKN memberikan penegasan berupa petunjuk pelaksanaan yang lebih terperinci, mengenai permasalahan di lapangan terkait dengan penertiban atas pemanfaatan BMN yang telah/terlanjur dimanfaatkan oleh Pihak Lain;
4. Pengalokasian pendanaan, sarana/prasarana, serta sumber daya manusia perlu lebih ditingkatkan serta menjadi skala prioritas. Tujuannya adalah agar pemantauan dapat diefektifkan, sehingga dapat diidentifikasi adanya BMN yang *unused* (idle), *underused*, atau *underutilize*, agar dapat ditindaklanjuti dengan langkah optimalisasi. Demikian juga meningkatkan fungsi pemantauan, agar BMN yang telah (terlanjur) dimanfaatkan pihak ketiga dapat segera dilakukan penertiban;
5. Terkait dengan kegiatan penertiban BMN, seharusnya DJKN, sebagai Pengelola Barang, harus proaktif melakukan pengawasan (monitoring) serta pembinaan kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang terkait pengelolaan BMN yang benar. DJKN, sebagai Pengelola Barang, harus mempunyai *blue print* yang jelas dalam melakukan optimalisasi atas penggunaan BMN yang *unused* (idle), *underused*, atau *underutilize*;

6. Pemberian insentif (*reward*) kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang serta Pengelola Barang atas pemanfaatan BMN agar segera direalisasikan.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dalam penelitian dapat disebabkan oleh kompetensi dari responden yang menyebabkan respon yang berbeda dari responden dalam menjawab pertanyaan tersebut. Selain itu, tingkat kesungguhan responden dalam menjawab pertanyaan dan memahami arti pentingnya penelitian juga berbeda, yang berdampak pada hasil pengolahan data dari wawancara.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Khusnul. 2012. *Implementasi Kebijakan Sewa Barang Negara*. Jember : Universitas Jember.
- As'ad, Moh, 2001. *Psikologi Industri*, Liberty, Yogyakarta.
- Charles A. Schuman dan Alan C. Brent. 2005. *Asset Life Cycle Management: towards improving physical asset performance in the process industry*.
- Chadwick, Bruce A, 1991. *Metode Penelitian Ilmu Sosial, (terjemahan)*, Sulistia ML. Semarang: IKIP Press.
- Dosset. D. L., Latham. G. P., and Mitchell, T. B. 1979. *Effects of assigned versus participately set goals, knowledge of results, and industrial differences on employes behavior when goal difficulty is the constan. Journal of Applied Psychology*. Vol. 84. No. 3, 291-298.
- Effendy, Uchjana Onong. 2004. *Ilmu Komunikasi Teori dan Prkatek*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Edwin Locke. 1968. "Toward a Theory of Tasks Motivation and Incentives" *American Institutes fo Research*, No. 3:157-89, 1968
- Hartoyo, Nafsi. 2014. *Optimalisasi Aset Negara/ Daerah*. Malang: Balai Diklat Malang.
- Kerlinger, Fred N. 2002. *Asas-Asas Penelitian Behavioral*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. 2005. Buletin Teknis Nomor 01 tentang Neraca Awal Pemerintahan Pusat. KSAP.
- Moh. Nazir. (1998). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. 2005. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- _____. Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah. 2014. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. 2007. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan

- Pemindahtanganan Barang Milik Negara. 2007. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- _____. Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Penyelesaian Terhadap Barang yang dinyatakan tidak dikuasi, Barang yang Dikuasi Oleh Negara, dan Barang yang Menjadi Milik Negara. 2006. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- _____. Nomor 78 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara. 2014. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- _____. Nomor 123 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Lain-Lain. 2013. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- _____. Nomor 33 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara. 2012. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- _____. Nomor 271 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tindak Lanjut Penertiban Barang: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Ritzer, George. 2005. *Teori Sosial PostModern*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Sekaran, Uma. 2006. *Metodologi Penelitian untuk Bisnis (Edisi 4)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. 2008. *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES.
- Siregar, Doli.D. 2014. *Manajemen Aset*, Jakarta: Satyatama Graha Tara
- Sugiyono. 2003. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : CV Alfabeta.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND*. Bandung : Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 2004. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- _____. Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 2003. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Universitas Hasanuddin. 2012. *Pedoman Penelitian Skripsi*. Makassar : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
- Yusuf, M. 2010. *Langkah Pengelolaan Aset Daerah Menuju Pengelolaan Keuangan Daerah Terbaik*. Jakarta: Salemba Empat

Lampiran 1: Biodata

BIODATA**Identitas Diri**

Nama : Mahenggiyang Bustan Basri
 Tempat, Tanggal Lahir : Makassar, 18 Maret 1988
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Alamat Rumah : Jalan Pattunuang Raya No. 61 Blok II, RT 003, RW 002, Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan
 Telpon : 085343880813
 Alamat *E-mail* : gianstan88@gmail.com

Riwayat Pendidikan

- Pendidikan Formal
 - Pada tahun 1994 – 2000 pada SD Inpres Antang I, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;
 - Pada tahun 2000 – 2003 pada SMP Negeri 23 Makassar, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;
 - Pada tahun 2003 – 2006 pada SMA Negeri 12 Makassar, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;
 - Pada tahun 2008 – 2011 pada Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, Bintaro, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten; dan
 - Pada tahun 2015 sampai sekarang pada Universitas Hasanuddin, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan.
- Pendidikan Nonformal
 - Diklat Teknologi Informasi Komputer yang diselenggarakan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan pada tahun 2014.

Pengalaman

- Organisasi
 - Pada tahun 2009/2010 menjadi Ketua Organisasi Daerah Ikatan Mahasiswa Anging Mammiri (IMAM) Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN)
- Kerja
 - Pada Tahun 2012 sampai sekarang pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan.

Lampiran 2: Pertanyaan Wawancara

➤ **Perkenalan**

➤ **Wawancara**

Pertanyaan:

1. Menurut Bapak, Apakah BMN yang berada pada wilayah kerja Kantor Bapak khususnya Tanah dan Bangunan yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga (idle) atau untuk optimalisasi BMN dengan tidak mengubah status kepemilikan pada Kementerian/Lembaga telah dilaporkan semua?, jika tidak kendalanya dimana?
2. Khusus untuk BMN tanah dan bangunan yang idle atau yang dapat dioptimalkan penggunaannya yang berada pada penguasaan Kementerian Keuangan yang berada pada wilayah kerja Kantor Bapak, apakah ada yang dimanfaatkan? Jika ada, apakah sudah optimal?
3. Berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya, dimana pemanfaatan BMN yang dalam penguasaan Kementerian Keuangan di wilayah kerja Bapak belum optimal, bisakah Bapak jelaskan kenapa Bapak berpendapat demikian?

4. Sehubungan dengan tugas instansi Bapak, sebagai pengelola BMN, Pemanfaatan BMN yang berada pada wilayah kerja Kantor Bapak yang memberikan sumbangsih terbesar sebagai penerimaan kas Negara ada pada kementerian/lembaga yang mana? Asetnya apa?
5. Faktor-faktor apa saja dalam Pemanfaatan BMN yang idle atau dalam rangka optimalisasi yang dapat meningkatkan PNBPN?
6. Upaya apakah yang dapat dilakukan agar Pemanfaatan BMN yang berada pada wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat (Kanwil DJKN Sulseltrabar) dapat dilakukan secara optimal?
7. Hal-hal apa saja yang menjadi penghambat sehingga tidak optimalnya pengelolaan BMN khususnya BMN Idle dalam mendukung peningkatan PNBPN yang berada pada wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat (Kanwil DJKN Sulseltrabar)?
8. Langkah-langkah apa saja yang dapat dilakukan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat (Kanwil DJKN Sulseltrabar) agar pemanfaatan BMN dapat dilakukan secara optimal sehingga dapat meningkatkan penerimaan APBN dari sektor PNBPN?

9. Pertanyaan terakhir, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pemanfaatan BMN dilakukan pada umumnya ketika Tanah dan Bangunan yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga (idle), kenapa kita tidak melakukan pemanfaatan BMN yang direncanakan dari awal, bahwa BMN ini akan dimanfaatkan (Tanah dan bangunan tersebut memang diadakan dan direncanakan untuk dibangun untuk komersil, seperti dibangun Gedung serba guna yang bisa digunakan oleh pihak lain dalam acara pernikahan, rapat, dan lain-lain), bisa juga dibangun hotel maupun mall (jika dana ada), karena kalau kita pikir, kenapa swasta mau melakukan hal tersebut karena profitnya besar, dan lain-lain, kenapa kita akan memanfaatkan BMN tersebut ketika memang telah idle, (tidak ada inovatif dari awal)?

Lampiran 3 : Foto-foto



Foto Bangunan yang disewakan ke pihak Artha Mart



Foto Ibu Khadijah (sekretaris) dan pegawai lainnya di ruangan sekretaris



Foto Ruangan Lantai 6 yang disewakan oleh pihak KPPU



Foto Ruangan Lantai 6 yang disewakan oleh pihak KPPU



Foto Peneliti bersama Bapak Hidayat Hasanuddin (Kepala Seksi Bagian Pengelolaan Kekayaan Negara)



Foto Gedung Keuangan Negara II Makassar



Foto Tanah Kanwil DJKN Sulseltrabar yang disewakan sebagai Kantin



Foto Plat Kanwil DJKN Sulseltrabar



Foto Ruang Pelayanan Kanwil DJKN Sulseltrabar



Foto Peneliti dengan salah satu staf Kanwil DJKN SULseltrabar



Foto Papan Tugu Gedung Keuangan Negara II Makassar



Foto Aula Kanwil DJKN Sulseltrabar lantai 5



Foto Peneliti bersama Bapak Tomi (Staf Bagian Pengelolaan Kekayaan Negara)

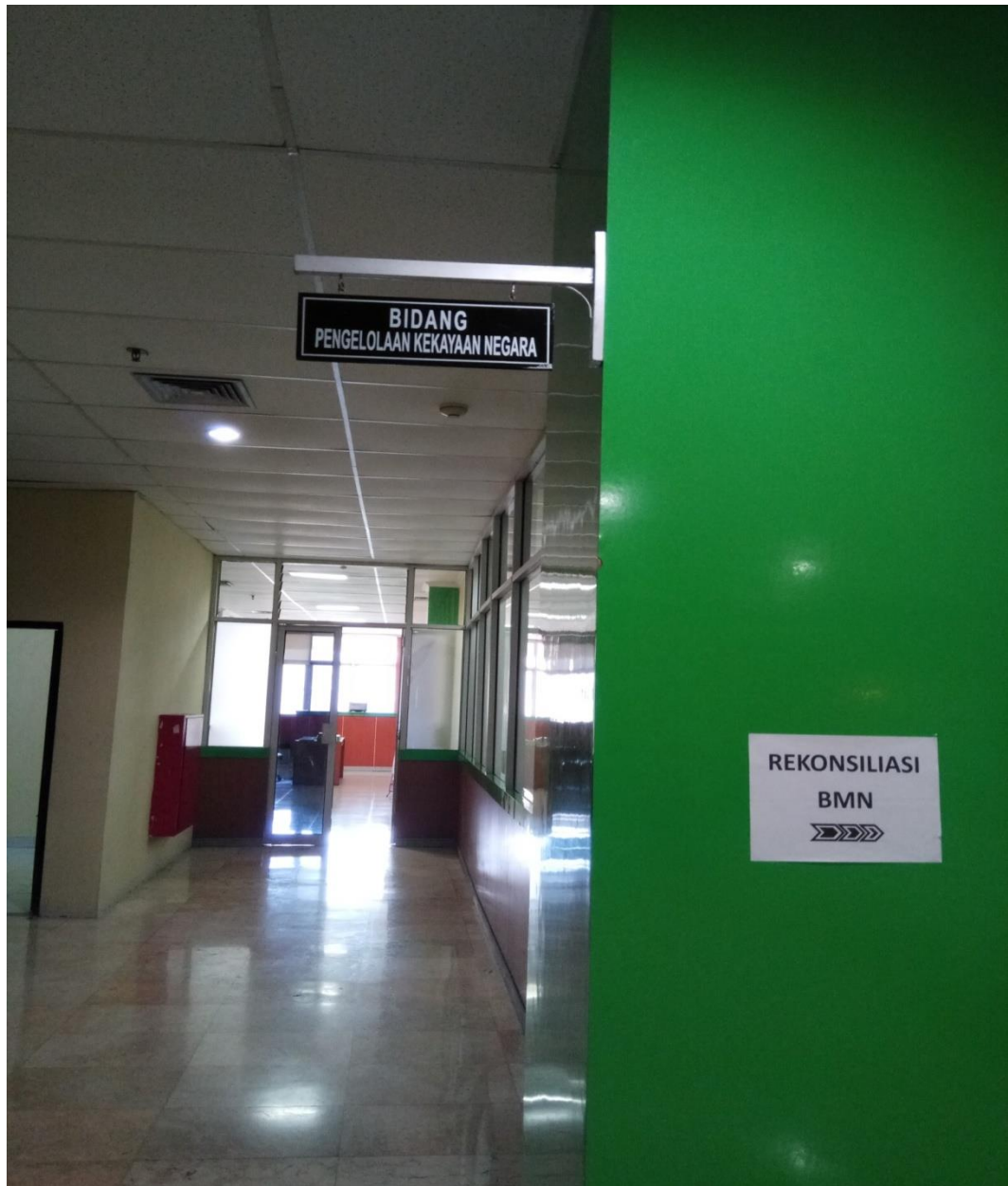


Foto Ruangan Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara



Foto Tanah Kanwil DJKN Sulseltrabar yang disewakan sebagai ATM